



PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

Anthony¹, Meutia Handayani², Cut Yunina Eriva³, Talbani Farlian⁴

¹ Mahasiswa Akuntansi Sektor Publik, valentony46@gmail.com

² Politeknik Aceh, meutiahandayani@politeknikaceh.ac.id

³ Politeknik Aceh, cut.eva@politeknik.ac.id

⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, t_farlian@usk.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Received: 2025-05-17

Revised: 2025-05-18

Accepted: 2025-05-19

Available online: 2025-05-30

KEYWORDS Sitem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh

CORRESPONDENCE MEUTIA HANDAYANI

E-mail:

meutiahandayani@politeknikaceh.ac.id,

ABSTRACT

This study aims to analyse the effect of the implementation of the Regional Financial Management Information System (SIPKD) on the quality of local government financial statements, with a case study focus on the Banda Aceh City Government. The city of Banda Aceh was chosen as the research location considering that its financial statements have so far obtained audit opinions stating overall fairness, indicating relatively good reporting quality. The research subjects included all Regional Work Units (SKPD) within the Banda Aceh City Government, with the participation of respondents consisting of the Treasurer of the Expenditure Assistant and the Assistant Financial Administration Officer (PPK). Based on the results of data analysis, it was found that the SIPKD implementation variable (X) had a positive and significant influence on the variable quality of financial statements (Y). This finding reflects that the use of SIPKD in Banda Aceh City has contributed significantly to improving the quality of financial reporting. In other words, the more optimal the implementation of SIPKD, the greater the impact in supporting the transparency and accountability of local government financial reports.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini sangat cepat, ditambah lagi dengan era digital yang semakin terasa di setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Hal ini berdampak pada sektor pelayanan publik di tingkat nasional, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan berbagai inovasi yang ada. Peningkatan ini diterapkan untuk mendapatkan hasil teknologi yang maksimal melalui penggunaan teknologi.

Sistem informasi keuangan daerah yang diterapkan saat ini, di rasakan sangat dibutuhkan untuk menerapkan otonomi daerah dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Komite Standar

Akuntansi Pemerintahan 2021). Kinerja sistem informasi pemerintahan bergantung pada bagaimana sistem dijalankan, seberapa mudah sistem digunakan, dan teknologi apa yang digunakan (Rahim et al., 2023). Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan serta memanfaatkan teknologi informasi terbaru untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dan menyampaikan informasi keuangan daerah kepada masyarakat. Ini adalah bagian dari proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Untuk sebuah wilayah. Pelaksanaan anggaran, perencanaan, pencatatan, dan akuntabilitas merupakan semua contoh cara yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan di tingkat SKPD

Penggunaan yang disebut Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) menghasilkan berbagai laporan keuangan yang merupakan standar pelaporan keuangan yang baik. Hal ini diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan daerah, pengguna SIPKD harus memahami modul-modul yang ada dalam aplikasi. Upaya ini adalah cara yang tepat untuk menerapkan SIPKD dengan benar. Sumber daya manusia yang memiliki hasil kompeten juga dikaitkan dengan pemahaman pengguna. Agar mereka dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik, pengguna harus diberi pelatihan, pendidikan, dan pengalaman yang cukup (Pusdatinkomtel 2013).

SIPKD merupakan tools yang dibangun oleh direktorat jenderal (Dirjen) kemendagri (<https://www.lek2pndiklat.com> n.d.), dalam kegiatan memaksimalkan sumber yang baik dalam menghimpun informasi keuangan daerah. Namun, hingga saat ini pengaplikasiannya belum sempurna dan masih menemui banyak kendala. Anggaran-anggaran yang dialokasikan malah justru sulit direalisasikan. Kendala lain yang terdapat dalam penerapan SIPKD ini dikarenakan mutasi pegawai yang sering terjadi dalam suatu SKPD yang sangat singkat, sehingga pegawai baru memerlukan pelatihan lagi, namun dengan anggaran yang terbatas pelatihan tersebut sulit dilakukan sehingga pegawai tersebut harus belajar dengan pegawai lainnya, tentunya pengetahuan yang dimiliki tidak seutuhnya sehingga berdampak pada penggunaan aplikasi dan juga outputnya yaitu ke laporan. Meskipun implementasi aplikasi SIPKD masih belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan fitur yang tersedia, hal tersebut tidak secara signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Laporan keuangan tetap disusun secara tepat waktu dan konsisten memperoleh evaluasi positif. Penelitian yang dilakukan oleh Yusup (2016) mengulas adanya korelasi antara penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan peningkatan kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, temuan serupa juga diungkapkan oleh M. Wisnu (2023), yang menyatakan bahwa keberadaan sistem informasi pengelolaan keuangan berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana terlihat dalam studi kasus di Kabupaten Lombok Tengah.

Studi lain (Fitriani 2023) menginformasikan terkait penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah. Namun, penelitian lain (Handayani, Sari, dan Yuniarti 2022) melihat bagaimana SIPKD dan pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan kabupaten Subang. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan kabupaten Subang tidak mempengaruhi pengendalian internal secara signifikan.

Dengan melihat beberapa fenomena dan perbedaan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memberi tahu instansi tentang pentingnya penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Banda Aceh.

2. TINJAUAN PUSTAKA / PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Laporan Keuangan Pemerintah

Fathiyah dan Masnun (2017) menyatakan bahwa laporan keuangan pada tingkat pemerintah daerah merupakan bentuk penyajian secara sistematis atas aktivitas pengelolaan sumber daya keuangan yang dilakukan oleh entitas pemerintah daerah dalam suatu periode fiskal tertentu. Laporan ini disusun untuk memenuhi tujuan penyediaan informasi yang relevan, dapat dipercaya, serta dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban publik mengenai kondisi keuangan, kinerja operasional, serta dinamika perubahan posisi keuangan daerah. Mengacu pada klasifikasi yang diatur oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2013), laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas beberapa komponen utama yang dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintahan daerah.

1. **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)** merupakan dokumen yang menyajikan informasi menyeluruh mengenai pemanfaatan sumber daya ekonomi oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Laporan ini menggambarkan sejauh mana alokasi anggaran yang telah direncanakan direalisasikan, dengan mencakup unsur-unsur utama seperti penerimaan, pengeluaran, transfer, serta aktivitas pembiayaan selama tahun anggaran berjalan.
2. **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)** memberikan gambaran mengenai dinamika saldo anggaran lebih antarperiode pelaporan. Informasi yang disampaikan mencakup saldo awal, pemanfaatan saldo anggaran lebih, sisa pembiayaan dari tahun berjalan, penyesuaian atas kesalahan pencatatan di masa lalu, hingga posisi saldo akhir pada periode pelaporan tersebut.
3. **Neraca Keuangan** merepresentasikan kondisi keuangan suatu pemerintah daerah pada titik waktu tertentu. Di dalamnya tercermin total kekayaan (aset), kewajiban yang harus diselesaikan, serta nilai bersih kekayaan daerah (ekuitas). Aset yang dicantumkan mencakup kas, investasi, piutang, persediaan, hingga aset tetap. Kewajiban dikelompokkan menurut jangka waktu pelunasannya, sedangkan ekuitas menunjukkan akumulasi kekayaan bersih pemerintah daerah.
4. **Laporan Operasional** menggambarkan hasil aktivitas ekonomi pemerintah selama satu tahun anggaran, yang berdampak langsung pada perubahan nilai ekuitas. Laporan ini menampilkan berbagai pos pendapatan dan beban, termasuk transfer dan kejadian luar biasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.
5. **Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Kinerja Keuangan** memuat informasi tentang fluktuasi nilai ekuitas antarperiode yang disebabkan oleh hasil operasional, aktivitas lainnya, serta koreksi pembukuan dari periode sebelumnya. Sementara itu, laporan kinerja keuangan memberikan gambaran menyeluruh mengenai pendapatan dan pengeluaran berbasis akrual, diklasifikasikan menurut fungsi dan jenis ekonomi, serta menyajikan informasi mengenai surplus atau defisit yang dicapai.
6. **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)** melengkapi laporan utama dengan penjelasan rinci mengenai pos-pos yang dilaporkan. CaLK juga mencantumkan kebijakan akuntansi yang digunakan serta uraian teknis yang berkaitan dengan penyusunan laporan sesuai dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, pemerintah daerah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Laporan keuangan yang berkualitas akan memberikan informasi yang dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Menurut Lestari dan Nugraeni (2024), laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan berkualitas apabila memenuhi sejumlah karakteristik penting. Dua di antaranya adalah:

1. **Relevansi**, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memiliki manfaat nyata bagi pengguna, khususnya dalam mendukung proses pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun kebijakan publik.

2. **Keandalan (reliability)**, yang berarti informasi tersebut harus dapat dipercaya, tidak menyesatkan, disampaikan secara jujur, dapat diverifikasi, netral, serta mudah dipahami oleh pengguna.

Selain itu, merujuk pada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP, 2016), laporan keuangan yang baik juga seharusnya memenuhi sepuluh karakteristik utama, yaitu: dapat dipahami, relevan, memiliki materialitas yang tepat, andal, disajikan secara jujur, berbasis substansi daripada bentuk formal, netral, disusun dengan kehati-hatian (*prudence*), lengkap, dan dapat diperbandingkan dari waktu ke waktu.

Karakteristik-karakteristik tersebut tidak hanya menjadi pedoman teknis dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip akuntabilitas publik. Dengan laporan yang memenuhi standar tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat semakin meningkat.

Sistem Informasi Pengolahan Keuangan Daerah (SIPKD)

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan salah satu komponen penting dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), yang berperan sebagai platform terintegrasi untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara optimal. Aplikasi ini dirancang dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yakni efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi, akuntabilitas, serta dapat diaudit. Pengembangan SIPKD dilakukan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, sebagai sarana untuk mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data keuangan daerah secara terstruktur dan efisien.

Pengelolaan aplikasi ini berada di bawah tanggung jawab Subdirektorat Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban. Kehadiran SIPKD menjadi salah satu bentuk konkret komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam memfasilitasi daerah untuk memahami dan menjalankan ketentuan perundang-undangan terkait keuangan publik secara konsisten dan sistematis.

Secara fungsional, SIPKD mendukung kegiatan utama dalam siklus keuangan daerah seperti perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam penyimpanan dan pengelolaan data keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Sebagaimana dijelaskan oleh Heryanto (2022), SIPKD memiliki fungsi strategis dalam menyediakan informasi yang akurat dan tepat guna bagi pemerintah daerah. Dengan kapabilitasnya dalam mencatat, mengelola, serta memproses data terkait pengelolaan keuangan daerah, SIPKD berfungsi sebagai sistem informasi yang memungkinkan transformasi data mentah menjadi informasi yang transparan dan informatif, serta dapat diakses sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat luas.

Tujuan SIPKD

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan komponen integral dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), yang dirancang sebagai perangkat aplikasi terpadu untuk mendukung pemerintah daerah dalam menerapkan berbagai regulasi di bidang keuangan secara lebih efisien, efektif, transparan, ekonomis, akuntabel, dan dapat diaudit. SIPKD dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, sebagai sarana untuk mempercepat proses integrasi dan transmisi data keuangan daerah secara terpusat.

Pengelolaan teknis aplikasi SIPKD berada di bawah koordinasi Subdirektorat Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan bagian dari Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan. Aplikasi ini dirancang sebagai sarana nyata dukungan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengaplikasikan serta memahami aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola keuangan daerah.

Dalam pandangan Heryanto (2022), terdapat sejumlah peran penting yang dijalankan oleh SIPKD, antara lain:

1. Menyokong pemerintah daerah dalam aktivitas pengelolaan informasi keuangan, mulai dari proses penyusunan anggaran, perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban;
2. Mendorong terciptanya laporan keuangan yang lebih sistematis, akurat, dan tepat waktu;
3. Menjadi media penyimpanan dan pengelolaan data keuangan yang mendukung pengambilan keputusan manajerial;
4. Memberikan akses terhadap informasi keuangan yang bernilai guna bagi pihak internal maupun eksternal yang membutuhkan transparansi.

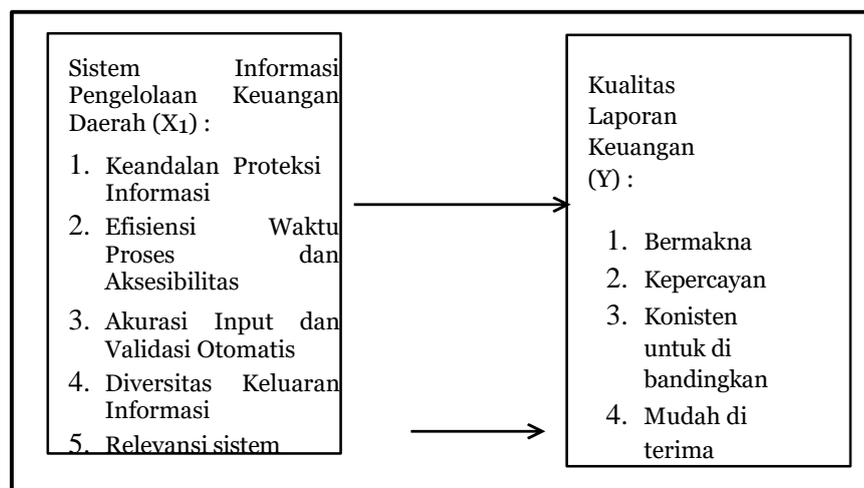
Dengan fungsi-fungsi tersebut, SIPKD dikategorikan sebagai platform digital modern yang terintegrasi, yang perannya signifikan dalam mendorong praktik pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien di lingkungan pemerintahan daerah.

Tujuan dan Implementasi SIPKD

Berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021), tujuan utama dari pengembangan dan implementasi SIPKD serta sistem regional SIKD adalah untuk membangun dan menerapkan aplikasi keuangan daerah berbasis praktik terbaik internasional, yang telah diadopsi di 33 provinsi dan 138 kabupaten/kota terpilih di Indonesia.

SIPKD memainkan peran strategis dalam membantu pemerintah daerah menyusun, menyajikan, dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat. Implementasi sistem ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik.

Hingga saat ini, SIPKD telah diadopsi oleh 171 kabupaten/kota, mencerminkan keberhasilan transformasi digital dalam sektor pemerintahan. Penerapan teknologi informasi melalui SIPKD terbukti mendukung peningkatan kualitas kinerja birokrasi, yang secara langsung berkontribusi terhadap efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Dengan demikian, SIPKD berperan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran
Sumber : penulis (2025)

Hipotesis

Berdasarkan konstruksi logis dari kerangka pemikiran serta paradigma penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₀₁ : Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap mutu laporan keuangan pemerintah daerah.

H_{a1} : Terdapat pengaruh signifikan dari penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Responden dalam penelitian ini terdiri atas Bendahara Pembantu Pengeluaran dan Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di masing-masing SKPD. Fokus utama penelitian diarahkan pada tiga variabel utama, yakni kualitas sumber daya manusia, kualitas teknologi informasi, dan kualitas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner, yang disusun dalam bentuk pernyataan tertulis dan diberikan secara langsung kepada responden untuk diisi. Seperti dijelaskan oleh MR (2022), kuesioner merupakan teknik yang efektif dalam memperoleh data persepsi dan sikap responden terhadap variabel penelitian. Dalam hal ini, kuesioner disusun berdasarkan skala Likert lima poin, dengan pilihan jawaban yang mencerminkan tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diberikan. Kuesioner disebarkan kepada pegawai SKPD guna mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel seperti pengawasan pimpinan, kedisiplinan, dan kompetensi pegawai terhadap kinerja keuangan daerah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sensus, di mana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Total populasi yang dijadikan responden berjumlah 88 orang, yang terdiri dari 44 Bendahara Pembantu Pengeluaran dan 44 Pembantu PPK yang berasal dari berbagai badan, dinas, dan kantor dalam struktur Pemerintah Kota Banda Aceh. Adapun SKPD yang menjadi populasi penelitian terdiri dari 44 unit kerja, yang mencakup 1 Sekretariat DPRK, 1 Sekretariat Daerah, 1 Inspektorat, 5 badan, 1 rumah sakit umum daerah, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 9 kantor kecamatan, 4 sekretariat keistimewaan, dan 21 dinas.

Analisis data dilakukan melalui proses penyusunan dan pengorganisasian data yang diperoleh dari hasil kuesioner, disusul dengan kategorisasi dan sintesis data. Mengacu pada Sugiyono (2017, hlm. 335), analisis data bertujuan untuk merumuskan pola, memilih informasi penting, serta menyusun simpulan yang dapat dipahami oleh peneliti maupun pihak lain. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan, penelitian ini menggunakan metode analisis statistik dengan pendekatan regresi linear sederhana. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan data demografis yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Dari total 73 responden, data diklasifikasikan ke dalam lima kategori karakteristik, yaitu berdasarkan jabatan, masa kerja, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Berdasarkan distribusi jenis kelamin, sebanyak 39 responden atau 53,4% merupakan laki-laki, sedangkan 34 responden atau 46,6% adalah perempuan. Dengan demikian, responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki.

Dari segi jabatan, sebanyak 27 responden (37%) menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran, diikuti oleh 21 responden (28,8%) yang berperan sebagai Pembantu Bendahara. Selanjutnya, terdapat 14 responden (19,2%) yang menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, dan 11 responden (15,1%) sebagai Pembantu PPK SKPD.

Hasil Pengujian Hipotesis

Untuk menjawab rumusan hipotesis dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode analisis regresi linier sederhana, dengan fokus pada satu variabel bebas, yakni penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Proses pengolahan data dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak statistik SPSS. Hasil dari analisis tersebut ditampilkan dalam Tabel 1, yang memuat nilai koefisien regresi serta tingkat signifikansi hubungan antara penggunaan SIPKD dan mutu laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 1 Analisis Linear Sederhana
Coefficients a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients
	B	Std. Error
1	(Constant)	8,466
	SIPKD X	0,497

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan Tabel 1, hasil analisis regresi linier sederhana tersebut diperoleh nilai koefisien variabel SIPKD (X) sebesar 0,497. Maka dari itu persamaan regresi yang dapat diperoleh yaitu sebagai berikut:

$$Y = 8,466 + 0,497 X + e$$

Dimana:

Y = Kualitas Laporan Keuangan X =
penerapan SIPKD

e = Standar error

Berdasarkan hasil analisis regresi linier sederhana, diperoleh persamaan yang mengindikasikan bahwa:

1. **Nilai konstanta sebesar 8,466** menunjukkan bahwa apabila variabel penerapan SIPKD (X) bernilai nol, maka nilai prediktif dari variabel kualitas pelaporan keuangan (Y)

adalah sebesar 8,466. Hal ini mencerminkan nilai dasar kualitas laporan keuangan dalam kondisi di mana sistem SIPKD belum diterapkan.

2. **Koefisien regresi variabel penerapan SIPKD sebesar 0,497** mengindikasikan hubungan positif antara penerapan SIPKD dan kualitas laporan keuangan. Artinya, setiap peningkatan sebesar 1% dalam penggunaan atau penerapan SIPKD akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,497%, dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Sebaliknya, penurunan penerapan SIPKD akan menurunkan kualitas laporan keuangan dengan proporsi yang sama.

1) Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen **Uji-t** dilakukan guna menilai seberapa besar pengaruh variabel bebas, yaitu implementasi SIPKD, terhadap variabel terikat berupa kualitas laporan keuangan, secara terpisah atau individual. Kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:

Jika nilai **t-hitung lebih besar dari t-tabel**, maka hipotesis nol (**H₀**) ditolak dan hipotesis alternatif (**H_a**) diterima. Ini menunjukkan bahwa variabel SIPKD secara parsial berkontribusi secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sebaliknya, apabila **t-hitung lebih kecil dari t-tabel**, maka **H₀** diterima dan **H_a** ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan secara individu.

Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel penerapan SIPKD (**X**) dengan kualitas laporan keuangan (**Y**), maka digunakan uji-t yang hasil perhitungannya tercantum dalam Tabel 2. Analisis ini menjadi landasan dalam menentukan kekuatan dan makna hubungan tersebut dalam konteks Pemerintah Kota Banda Aceh.

Tabel 2 Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients a

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	8,466	2,938		2,881	0,005
SIPKD X	0,497	0,054	0,742	9,132	0,000

Sumber: data diolah

Pengaruh Penggunaan SIPKD (X) secara Parsial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh (Y)

Berdasarkan data pada Tabel 2, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai **t-hitung** untuk variabel implementasi SIPKD tercatat sebesar **9,132**. Sementara itu, pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan ($df = 71$, diperoleh dari rumus $n - k - 1$, yaitu $73 - 1 - 1$), diperoleh nilai **t-tabel** sebesar **0,677**. Karena nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel ($9,132 > 0,677$), maka hipotesis nol (**H₀**) ditolak dan hipotesis alternatif (**H_a**) diterima. Artinya, terdapat hubungan yang bermakna dan positif antara penggunaan SIPKD (**X₁**) dengan kualitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh (**Y**).

Hal ini juga diperkuat oleh nilai signifikansi sebesar **0,000**, yang jauh lebih kecil dari ambang batas 0,05. Oleh karena itu, secara statistik dapat dinyatakan bahwa penerapan SIPKD memiliki pengaruh yang nyata terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Effendi (2019) dan Yusup (2016), yang mengemukakan bahwa penggunaan SIPKD memberikan kontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil ini bertentangan dengan studi Khairunnas (2014), yang menyatakan bahwa penerapan SIPKD tidak berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di daerah.

Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana variasi dalam variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas dalam model regresi. Pada regresi linier sederhana, nilai **R Square** digunakan untuk menunjukkan kekuatan hubungan tersebut. Sementara dalam konteks regresi berganda, nilai **Adjusted R Square** lebih relevan karena memperhitungkan jumlah variabel dalam model, sehingga memberikan estimasi yang lebih akurat terhadap daya jelaskan model tersebut. Nilai koefisien determinasi ini dapat ditemukan pada Tabel 3 berikutnya.

Tabel 3 Koefisien Determinasi R²

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,742 ^a	0,551	0,544	2,38335	1,825

a. Predictors: (Constant), SIPKD

b. Dependent Variable: KualitasLAPKEU

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh nilai R Square sebesar 0,551 atau 55,1%. Artinya, sebesar 55,1% variasi dalam kualitas laporan keuangan (Y) dapat dijelaskan oleh variabel penggunaan SIPKD (X). Sementara itu, sisanya sebesar 44,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Pengaruh Penggunaan SIPKD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan SIPKD (X) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Hal ini ditunjukkan oleh nilai **t hitung (9,132)** yang lebih besar daripada **t tabel (2,02269)**, serta nilai signifikansi (**0,000 < 0,05**). Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi SIPKD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh telah berjalan secara efektif, sehingga mampu mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan kata lain, semakin optimal penggunaan SIPKD, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Memainkan peranan penting sebagai alat bantu pengendalian internal dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah. Sistem ini dirancang secara terintegrasi guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan peraturan di bidang pengelolaan keuangan publik. Efektivitas pemanfaatan SIPKD bergantung pada berbagai aspek, seperti optimalisasi fitur sistem, ketepatan dalam penerapan mekanisme kontrol internal, serta efisiensi pelaksanaan proses

administrasi keuangan. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi signifikan terhadap tersusunnya laporan keuangan yang andal dan disampaikan tepat waktu.

Temuan dari studi ini konsisten dengan hasil riset yang dilakukan oleh Effendi (2019) dan Yusup (2016), yang menyatakan bahwa implementasi SIPKD memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan. Namun demikian, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Handayani et al. (2022), yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan SIPKD tidak secara signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIPKD berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh, baik dari segi keakuratan informasi maupun ketepatan waktu penyampaian laporan.

REFERENSI

- Fathiyah, Fathiyah, and Masnun Masnun. 2017. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum Dan Sesudah Diterapkannya Basis Akrual Tahun 2014 - 2015." *EKONOMIS : Journal of Economics and Business* 1(1):70. doi: 10.33087/ekonomis.v1i1.8.
- Fitriani, A. 2023. "... Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Serta Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan" *Proposal Penelitian* 7(April):37-49.
- Handayani, Fice, Dina Mustika Sari, and Adea Yuniarti. 2022. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 11(1):9-20. doi: 10.32639/jiak.v11i1.14.
- Heryanto, Evania Alberta. 2022. "Pengaruh Pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sekadau." *Jurnal FinAcc* 7(24):246-56.
- <https://www.lek2pndiklat.com>. n.d. "BIMTEK SIPKD." Retrieved (<https://www.lek2pndiklat.com/bimtek-sistem-informasi-pengelolaan-keuangan-daerah-sipkd/>).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. "Website PEN." *Kementerian Keuangan Republik Indonesia* 6-7.
- Kementerian Keuangan RI, Dirjen Perimbangan Keuangan. 2013. "Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689-99.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2021. "Standar Akuntansi Pemerintahan." *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan* (71):160-73.
- KSAP. 2016. "Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan." *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan* 1-40.
- Lestari, Anggia Septie Ayu, and Nugraeni. 2024. "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)* 4(2):1228-38.
- M. Wisnu Pratommi, Saipul Arni Muhsyaf, and Isnawati. 2023. "Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 3(4):99-109. doi: 10.29303/risma.v3i4.955.
- MR, Hasan. 2022. "Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Skripsi." *Rake Sarasin* (3):51.
- Pusatinkomtel. 2013. "Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah." *Speed-Sentra Penelitian Engineering Dan Edukasi* 9(1):1-17.

Rahim, M., M. Akib, M. Natsir, and N. Mirosea. 2023. "Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kantor Camat Latambaga Kabupaten Kolaka." *JPEP (Jurnal Progres ...* 8:195–204.